



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN NEGERI LAMONGAN**  
Jl. Veteran No. 18 KAB. LAMONGAN  
JAWA TIMUR  
<http://www.pn-lamongan.go.id/>



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025**

**SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**NILAI INDEKS**

**3,92 / 98,12%**

Jumlah	69 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 42	
	PEREMPUAN : 27	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 15	Diploma 3 : 0
	SMU : 34	S1 : 20
	Diploma 1 : 0	S2 : 0
		S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 2	SWASTA : 55
	TNI : 0	WIRUSAHA : 8
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 2
	LAINNYA : 2	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	3,855
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,855
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBp )	3,855

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1.
1. Memberikan intruksi kepada seluruh Hakim dan Pegawai serta petugas layanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Lamongan untuk menghubungi pengguna layanan dan tidak menjanjikan apapun terkait pengurusan produk Pengadilan, dan Memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku kepada hakim atau pegawai yang terbukti menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan, serta selalu mengingatkan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan untuk tidak menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan.

2. Memberikan intruksi kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan serta petugas layanan terpadu satu pintu untuk menyampaikan informasi tentang tarif/biaya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk admin website atau media sosial agar selalu mengupdate informasi terkait biaya layanan pada Pengadilan Negeri lamongan sehingga masyarakat mengetahui tentang informasi tersebut.

3. Memberikan intruksi kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan untuk bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan wajib memberikan bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan.

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

6 Januari 2026  
Ketua Pengadilan Negeri